



## Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Nelayan di Danau Singkarak, Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat

Rosni<sup>1\*</sup>, Ryan Pramana<sup>2</sup>, Nurul Ilmi<sup>3</sup>, Putri Roito Lumbantobing<sup>4</sup>,  
Anisah Niwanda<sup>5</sup>, Putri Rahmadani<sup>6</sup>, Ridho Amalan Saufi<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Indonesia

\*Korespondensi Penulis : [ryanpramana202@gmail.com](mailto:ryanpramana202@gmail.com)

**Abstract:** Lake Singkarak is a tectonic lake that plays a vital role in supporting the economic life of the surrounding community, especially traditional fishermen in Nagari Sumpur. However, pressure on the ecosystem and the decline in the population of bilih fish pose a threat to the sustainability of fishermen's livelihoods. This study aims to analyze the form of community empowerment carried out and its impact on improving the fishermen's economy. The study was conducted through a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. The results of the study showed that although an empowerment program had been carried out through assistance with fishing gear and PAP funds, its sustainability was not well maintained. Fishermen's income has not shown a significant increase, and tourism development has not fully touched their welfare. A more integrated strategy is needed between the fisheries and tourism sectors to realize sustainable empowerment.

**Keywords:** Community Empowerment, Fishermen's Economy, Lake Singkarak, Sumpur Village, Ecotourism

**Abstrak** Danau Singkarak merupakan danau tektonik yang memiliki peran vital dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat sekitar, khususnya nelayan tradisional di Nagari Sumpur. Namun, tekanan terhadap ekosistem dan menurunnya populasi ikan bilih menjadi ancaman bagi keberlanjutan mata pencaharian nelayan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pemberdayaan masyarakat yang dilakukan serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi nelayan. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pernah dilakukan program pemberdayaan melalui bantuan alat tangkap dan dana PAP, keberlanjutannya kurang terjaga. Pendapatan nelayan belum menunjukkan peningkatan signifikan, dan pengembangan wisata belum sepenuhnya menyentuh kesejahteraan mereka. Dibutuhkan strategi yang lebih terintegrasi antara sektor perikanan dan pariwisata untuk mewujudkan pemberdayaan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Masyarakat, Ekonomi Nelayan, Danau Singkarak, Nagari Sumpur, Ekowisata

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang terdiri dari pulau-pulau memiliki potensi sumber daya air yang sangat melimpah, termasuk danau-danau besar yang terletak di berbagai daerah. Salah satu danau yang memiliki nilai penting baik secara ekologis maupun sosial ekonomi adalah Danau Singkarak di Provinsi Sumatera Barat. Danau ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber kehidupan bagi ekosistem air tawar, tetapi juga sebagai tumpuan utama bagi mata pencaharian masyarakat sekitarnya, terutama nelayan tradisional yang mengandalkan sumber daya perikanan dari danau tersebut. Salah satu keanekaragaman hayati Danau Singkarak yang sangat berharga adalah ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*), yakni spesies ikan endemik yang hanya ada di danau ini. Akan tetapi, populasi ikan bilih menghadapi tekanan berat akibat penangkapan yang berlebihan, polusi air, serta pemakaian alat tangkap yang tidak bersahabat dengan lingkungan. Keadaan ini berpengaruh besar terhadap berkurangnya penghasilan dan kesejahteraan para nelayan di daerah tersebut. Nagari Sumpur, sebuah nagari di Kecamatan

Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, merupakan area yang cukup aktif dalam inisiatif konservasi dan pemberdayaan komunitas nelayan. Sejak tahun 2004, pemerintah nagari telah menerapkan Peraturan Nagari No. 3 Tahun 2004 yang mengatur prosedur penangkapan ikan untuk melindungi kelestarian ikan bilih. Kebijakan tersebut melarang penggunaan bahan peledak, racun, dan alat setrum dalam aktivitas penangkapan ikan, serta menetapkan rumpon dan suaka buatan sebagai komponen dari strategi konservasi. Sebaliknya, keadaan sosial ekonomi komunitas nelayan belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Akses ke teknologi penangkapan modern, pendanaan, serta jaringan pemasaran hasil tangkapan tetap menjadi masalah yang dihadapi. Usaha pemberdayaan yang telah dilakukan sejauh ini masih bersifat terbatas dan kurang berkesinambungan. Maka dari itu, pendekatan pemberdayaan masyarakat yang menyeluruh sangat krusial, meliputi pelatihan, pendampingan usaha, penguatan lembaga, serta integrasi dengan sektor lain seperti pariwisata yang berbasis perairan. Menurut penelitian ini, tujuan adalah untuk meneliti bentuk-bentuk pemberdayaan bagi masyarakat nelayan yang telah diterapkan di Nagari Sumpur serta menganalisis pengaruhnya terhadap peningkatan ekonomi para nelayan.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan bentuk pemberdayaan masyarakat dan dampaknya terhadap ekonomi nelayan di Danau Singkarak. Lokasi penelitian berada di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, dan dilaksanakan pada 24 April 2025. Informan penelitian dipilih secara purposive, yaitu nelayan tradisional, tokoh masyarakat, perangkat nagari, serta pihak terkait program pemberdayaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan validitas data, digunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode.

## **3. HASIL**

### **Kondisi Ekonomi Sebelum Pemberdayaan**

- Sebelum mengikuti program pemberdayaan, berapa rata-rata pendapatan bulanan dari usaha perikanan?
- Dalam sebulan, biasanya berapa kali Bapak/Ibu melaut?

- Dari mana Bapak/Ibu mendapatkan modal usaha sebelumnya?
- Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan akses terhadap teknologi perikanan sebelumnya?
- Sejauh mana keterampilan Bapak/Ibu dalam pengolahan hasil perikanan sebelum adanya program?



Berdasarkan hasil wawancara, informan utama merupakan seorang nelayan dengan pengalaman melaut lebih dari 24 tahun sejak tahun 1991. Selain sebagai nelayan, informan juga sempat bekerja sebagai sopir mobil ke luar daerah seperti Jakarta, menunjukkan adanya diversifikasi pekerjaan untuk menunjang ekonomi keluarga. Aktivitas penangkapan ikan dilakukan selama sekitar 20 hari per bulan, tergantung kondisi cuaca, dengan penghasilan rata-rata sekitar Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan.

#### Pelaksanaan Program Pemberdayaan

- Jenis program pemberdayaan apa saja yang Bapak/Ibu terima?
- Berapa lama program tersebut berlangsung?
- Selama program, berapa lama Bapak/Ibu mendapatkan pendampingan/bimbingan?
- Materi apa saja yang diberikan selama program tersebut?



Sebelumnya, pemerintah pernah memberikan bantuan dalam bentuk alat tangkap gratis yang disalurkan melalui kelompok nelayan. Namun, dalam lima tahun terakhir, pemberdayaan tersebut sudah tidak berjalan lagi. Bantuan terakhir yang disebutkan adalah dana PAP (Pajak Air Permukaan), yang kini pun sudah tidak diterima lagi oleh nelayan. Ketika masih aktif, program pemberdayaan memberikan dampak positif meskipun tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Nelayan di daerah ini masih menggunakan metode penangkapan ikan secara tradisional. Mereka menolak penggunaan alat tangkap yang merusak lingkungan seperti bom, setrum, dan bagan. Penangkapan dilakukan menggunakan jaring (jala) yang bersifat ramah lingkungan. Satu unit jaring memiliki daya tahan hingga 10–15 tahun dengan biaya sekitar Rp1.500.000. Disiplin dan pengawasan dari pemerintah desa (Nagari) cukup kuat, di mana pelanggaran aturan dapat dikenai sanksi tidak boleh melaut selama tiga bulan.

#### Kondisi Ekonomi Setelah Pemberdayaan

- Setelah mengikuti program, berapa rata-rata pendapatan bulanan Bapak/Ibu saat ini?
- Sekarang, berapa hari dalam sebulan Bapak/Ibu melaut?
- Sumber modal usaha Bapak/Ibu saat ini berasal dari mana?
- Bagaimana kondisi akses teknologi perikanan Bapak/Ibu sekarang?
- Bagaimana perkembangan keterampilan Bapak/Ibu dalam pengolahan hasil perikanan setelah program?



Terkait pengembangan desa wisata, informan menyatakan bahwa dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan belum begitu terasa secara langsung. Meski begitu, ada upaya pembangunan infrastruktur pendukung seperti pemasangan lampu penerangan di muara yang menjadi lokasi aktivitas nelayan. Kegiatan wisata cenderung ramai hanya pada hari-hari besar atau musim liburan. Pengelolaan perahu wisata dan pelibatan nelayan dalam kegiatan ekowisata masih belum optimal dan memerlukan sinergi yang lebih baik antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan komunitas nelayan.

#### **4. DISKUSI**

Kondisi ekonomi nelayan sebelum pemberdayaan menunjukkan adanya ketergantungan pada aktivitas melaut sebagai sumber utama pendapatan, dengan diversifikasi pekerjaan sebagai strategi untuk menopang ekonomi keluarga. Informan utama, yang telah memiliki pengalaman melaut lebih dari 24 tahun sejak tahun 1991, juga sempat bekerja sebagai sopir mobil lintas daerah, termasuk ke Jakarta. Hal ini mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi nelayan dalam memenuhi kebutuhan hidup, mengingat penghasilan dari kegiatan penangkapan ikan berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000 per bulan, tergantung pada kondisi cuaca dan keberhasilan tangkapan.

Aktivitas melaut dilakukan selama sekitar 20 hari dalam sebulan, dengan sisa waktu dimanfaatkan untuk perawatan peralatan dan beristirahat. Dari pekerjaan sampingan yang dilakukan seperti menjadi sopir mobil, menunjukkan bahwa pendapatan dari melaut tidak selalu mencukupi kebutuhan keluarga, terutama dalam situasi cuaca buruk atau hasil tangkapan yang rendah. Program pemberdayaan sebelumnya berusaha memberikan dukungan kepada

nelayan melalui bantuan alat tangkap gratis yang disalurkan melalui kelompok nelayan. Selain itu, dana PAP (Pajak Air Permukaan) juga pernah diterima nelayan sebagai bagian dari program pemberdayaan pemerintah. Meskipun bantuan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan aktivitas nelayan, manfaatnya tidak signifikan dalam meningkatkan pendapatan secara drastis.

Namun, dalam lima tahun terakhir, program ini sudah tidak berjalan lagi, mengakibatkan nelayan kembali bergantung pada metode penangkapan tradisional yang telah lama digunakan. Penting untuk dicatat bahwa nelayan tetap memegang prinsip kelestarian lingkungan dalam aktivitas mereka, menolak penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom, setrum, dan bagan. Sebagai gantinya, mereka menggunakan jaring (jala) yang lebih ramah lingkungan dengan daya tahan sekitar 10–15 tahun dan biaya sekitar Rp1.500.000 per unit. Praktik ini menunjukkan kepedulian terhadap keseimbangan ekosistem sekaligus memperlihatkan tingkat disiplin yang tinggi dalam komunitas nelayan. Pemerintah daerah turut memainkan peran dalam pengawasan aktivitas nelayan dengan menerapkan sanksi bagi pelanggar aturan, seperti larangan melaut selama tiga bulan jika terbukti menggunakan metode penangkapan yang merusak lingkungan. Sementara itu, pengembangan desa wisata sebagai bagian dari upaya pemberdayaan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi nelayan. Informan utama menyatakan bahwa meskipun ada pembangunan infrastruktur pendukung seperti pemasangan lampu penerangan di muara, manfaat langsung terhadap kesejahteraan nelayan masih belum terasa sepenuhnya. Aktivitas wisata di daerah tersebut cenderung bersifat musiman, dengan peningkatan jumlah pengunjung hanya terjadi pada hari-hari besar atau musim liburan. Potensi ekowisata yang melibatkan nelayan, seperti pengelolaan perahu wisata, masih belum dikembangkan secara optimal.

Kurangnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan komunitas nelayan menjadi tantangan utama dalam memastikan keberlanjutan program ekowisata yang benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dalam mengintegrasikan sektor perikanan dengan ekowisata, sehingga nelayan tidak hanya bergantung pada hasil tangkapan tetapi juga dapat memperoleh manfaat dari kegiatan pariwisata. Dengan peningkatan sinergi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, desa wisata berpotensi menjadi sarana pemberdayaan yang lebih efektif bagi komunitas nelayan, memberikan tambahan pendapatan yang stabil dan berkelanjutan.

## 5. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi nelayan sebelum pemberdayaan cukup beragam, dengan adanya diversifikasi pekerjaan sebagai strategi untuk menopang pendapatan keluarga. Meskipun program pemberdayaan sebelumnya sempat memberikan bantuan, keberlanjutannya tidak terjaga, menyebabkan nelayan tetap bergantung pada metode penangkapan tradisional yang ramah lingkungan. Disiplin dan pengawasan pemerintah desa cukup ketat, namun tantangan ekonomi masih menjadi kendala utama. Sementara itu, pengembangan desa wisata sebagai bentuk pemberdayaan belum berdampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan karena masih bersifat musiman dan belum terintegrasi secara optimal dengan kehidupan mereka. Oleh karena itu, diperlukan sinergi lebih kuat antara pemerintah desa, pengelola wisata, dan komunitas nelayan agar ekowisata dapat benar-benar memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi nelayan setempat

## DAFTAR REFERENSI

- Aymon, C., & Holloway, I. (2002). *Qualitative research methods in public relations and marketing communications* (C. Wiratama, Trans.). Yogyakarta: Bentang.
- Azhim, A., Afifuddin, & Hayat. (2019). *Pemberdayaan masyarakat: Pendekatan sosial dan transformasi ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar. (2023). *Tanah Datar dalam angka 2023*. Batusangkar: BPS.
- Daymon, C., & Holloway, I. (2002). *Qualitative research methods in public relations and marketing communications* (C. Wiratama, Trans.). Yogyakarta: Bentang.
- Fauzi, A. (2006). *Ekonomi sumber daya alam dan lingkungan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadi, I., Nugroho, F., & Bathara, L. (n.d.). Peraturan Nagari No. 3 Tahun 2004 tentang tata tertib penangkapan ikan dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat nelayan di Nagari Sumpur, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Sosial Ekonomi Pesisir*, 1(2), 1–6.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Statistik perikanan tangkap Indonesia tahun 2020*. Jakarta: Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap.
- Mulyadi, M. (2014). Sinergi antara sektor pariwisata dan perikanan: Tinjauan dari pemberdayaan ekonomi lokal. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 89–101.
- Nasution, H. (2018). Strategi pengembangan wisata berbasis masyarakat di kawasan danau. *Jurnal Pariwisata Nusantara*, 4(1), 34–45.

- Nugroho, R. (2011). *Kebijakan publik untuk negara berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Saragih, B. (1998). *Agribisnis: Paradigma baru pembangunan ekonomi berbasis pertanian*. Jakarta: IPB Press.
- Satria, A. (2015). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syandri, H. (1996). *Aspek reproduksi ikan bilih (*Mystacoleucus padangensis*) dan kemungkinan pembenihannya di Danau Singkarak* (Disertasi Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor).
- Yin, R. K. (1994). *Case study research: Design and methods* (2nd ed.). Oaks, CA: Sage Publications.
- Yustina, E., & Rahman, T. (2017). Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, 12(1), 51–62.